



KONTRAK BERJANGKA

MENGABDI DENGAN INTEGRITAS



SRG Perkuat Cadangan Pangan & Tekan Inflasi

Perdagangan Sebagai Sektor
Penggerak Pertumbuhan dan
Daya Saing Ekonomi, serta
Penciptaan Kemakmuran
Rakyat

**remarkable
Indonesia**

Kemendag
Kaji
SRG Garam
....6

Polda Sumsel Miliki
'PR' Brantas Praktik
Illegal PBK
....9

Kredit SRG Cianjur
Capai
Rp 5,2 miliar
....11





DARI REDAKSI



Foto : Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya, Ekonom Indef, Bustanul Arifin, Direksi PT. Pertanian dan Direksi Bank Jatim berdialog SRG di TV Surabaya.

Sistem resi gudang (SRG) sudah semakin mendesak diimplementasikan pada sejumlah komoditi pertanian guna stabilisasi harga, terjaminnya pasokan dan memberi motivasi kepada kalangan petani dalam menghasilkan komoditi berdaya saing tinggi. Selain itu, SRG juga diyakini menjadi salah satu instrumen yang dapat menekan laju inflasi akibat fluktuasi harga dampak dari minimnya pasokan komoditi pangan. Karenanya, perlu ada upaya besar mendorong implementasi SRG di sejumlah daerah yang mendapat dukungan dari pemerintah daerah serta lembaga keuangan.

Catatan tersebut di atas, merupakan hasil rekaman Redaksi dari penyelenggaraan seminar nasional SRG yang diselenggarakan Bappebti pada 20 September 2012, lalu di Hotel JW Mariot, Surabaya, Jatim.

Dalam kesempatan itu, Wamendag Bayu Krisnamurthi, juga mewacanakan agar komoditi garam masuk dalam skema pembiayaan SRG. Sehingga memberi kepastian harga dan pasar bagi petani garam. Di sisi lain, SRG garam akan sejalan dengan kebijakan Kemendag yang menetapkan harga jual garam sesuai dengan peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri No. 2/2011. Pada kebijakan itu, harga penjualan garam kualitas 1 di tingkat petani minimal Rp 750 per kg, sedangkan garam kualitas 2 minimal Rp 550 per kg.

Wamendag mengakui, implementasi SRG di sejumlah daerah masih menghadapi sejumlah kendala baik yang diakibatkan rendahnya pengetahuan petani maupun kurangnya dukungan berbagai lembaga pembiayaan.

Namun, Bayu Krisnamurthi menegaskan, ke depan bisnis komoditas pertanian merupakan bisnis yang menjanjikan potensi besar. Karena itu, Ernst & Young melau-

lui kajiannya menempatkan Indonesia di urutan ke tujuh di dunia sebagai negara yang tingkat perekonomiannya tertinggi pada tahun 2030.

“Bisnis komoditas pertanian itu menjadi bisnis yang nggak ada matinya. Jadi SRG ini sangat menarik secara bisnis, kalau perangkat sudah lengkap tapi swasta nggak masuk ke SRG, dia akan melewatkan kesempatan besar,” tegas Bayu Krisnamurthi.

Terkait implementasi SRG, Redaksi juga memperoleh informasi Kab. Cianjur, Jabar dan Kab. Barito Kuala, Kalsel, pada bulan September 2012, ini, telah menerbitkan resi gudang dengan jumlah yang cukup besar. Bahkan, pengelola gudang SRG Cianjur kewalahan menampung gabah hasil produksi petani. Pada periode September ini, SRG Cianjur menerbitkan resi gudang sebanyak 56 resi dengan nilai Rp 5,2 miliar.

Selain melaporkan hasil seminar nasional SRG, Redaksi juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Seperti hasil Rakor aparat penegak hukum di Palembang, Sumsel. Dari Rakor tersebut terungkap modus praktik ilegal perdagangan berjangka yang dilakukan secara on-line, telah merugikan masyarakat dengan tingkat kerugian yang cukup fantastis. Polda Sumsel memperkirakan tingkat kerugian masyarakat mencapai Rp 6 triliun.

“Nah, pembaca yang budiman, Redaksi dalam kesempatan ini juga menghimbau agar senantiasa waspada terhadap praktik-praktik ilegal perdagangan berjangka komoditi yang dilakukan pihak tak bertanggungjawab. Akhir kata, Redaksi mengucapkan selamat mengikuti sajian buletin yang kita cintai ini.

Salam!

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE

KONTRAK
BERJANGKA
MENGABDI DENGAN INTEGRITAS



Penerbit

Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi

**Penasihat/Penanggung
Jawab**

Syahrul R. Sempurnajaya

Pemimpin Redaksi

Nizarli

Wakil Pemimpin Redaksi

Subagiyo

Dewan Redaksi

Pantas Lumban Batu, Agus
Muharni S., Harry Prihatmoko,
Diah Sandita Arisanti, Poppy
Juliyanti, Erni Artati, Sri
Haryati, Rizali Wahyuni

Sirkulasi

Apriliyanto, Katimin, Umar
Hasan.

Alamat Redaksi

Gedung Bappebti Jl. Kramat
Raya No. 172, Jakarta Pusat.

www.bappebti.go.id

*Redaksi menerima artikel
ataupun opini dikirim lengkap
dengan identitas serta foto ke*

E-mail:

buletin@bappebti.go.id



Berita Utama.....4-7

- SRG Perkuat Cadangan Pangan & Tekan Inflasi
- Kemendag Kaji SRG Garam
- SRG Award 2012

Berjangka.....8-10

- Aparat Hukum Harus Seirama Dengan Bappebti
- Polda Sumsel Miliki "PR" Brantas Praktik Ilegal PBK
- JFX Center Upaya Tingkatkan Likuiditas Bursa

Pasar Lelang.....13

- Pacu Ragam Komoditas, Upaya Dongkrak Transaksi

Agenda Foto14-15

Aktualita.....16-17

- Waspada Aktivitas GBI Afiliasi Geneva
- RI Bisa Pimpin Karet Dunia
- Kontribusi Kontrak Kakao JFX 30 %
- SRG Karo dan Serdang Bedagai Siap Operasi

Analisa.....18

Info Harga.....19

Wawasan.....22-23

- Alur Efektif Pengaduan Investor

Kolom.....24-25

- Indonesia Produsen Emisi Karbon Dunia

Breaknews.....26

Resi Gudang.11-12

Batola Terbitkan
21 Resi Gudang



Komoditi...20-21

Inovasi Minyak Nabati
Layak Konsumsi



Kiprah...27

Cengkram Kuku Bimasakti
Diindustri Futures Trading





Wamendag, Bayu Krisnamurthi didampingi Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya memukul gong tanda dibukanya Seminar Nasional SRG.

SRG Perkuat Cadangan Pangan & Tekan Inflasi

SRG dapat digunakan sebagai instrumen dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, serta memperkuat logistik nasional.

Fenomena harga komoditas pertanian jatuh saat panen raya telah terjadi berulang kali dan berpotensi merugikan petani. Di sisi lain, saat masa paceklik akibat minimnya persediaan komoditas pertanian, berdampak meningkatkan presentase inflasi. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut dan menekan tingkat inflasi, perlu ada terobosan dalam pola pemasaran komoditas pertanian sehingga petani masih berpeluang memetik keuntungan. Serta, masyarakat sebagai konsumen pun nyaman dengan tingkat harga stabil dengan kecukupan persediaan komoditas pertanian.

Salah satu strategi alternatif yang bisa digunakan untuk stabilisasi harga komoditas pertanian baik di tingkat petani dan maupun di tingkat konsumen yakni sistem resi gudang (SRG). Demikian antara lain diutarakan Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, saat membuka.

Seminar nasional yang diselenggarakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) itu menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan praktisi, akademisi dan instansi pemerintah. Diantaranya, Guru Besar Univ. Lampung dan Ekonom INDEF, Bustanul Arifin, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Agus Suprijanto, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, Kemenko Perencanaan, Nur Muhamad Sinungan, Direktur DKBU, Deprt. Kredit BPR dan UMKM, Bank Indonesia, Zainal Abidin, Kepala Divisi Pergudangan PT Pertani, Ade Taufik dan Direktur Bank Jatim, M. Salosin.

Serta Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya. Seminar nasional SRG itu juga dihadiri sejumlah kepala daerah berdirinya gudang SRG, dinas perdagangan, kalangan perbankan, akademisi, kelompok tani serta instansi terkait.

Lebih jauh dikatakan Bayu Krisnamurthi, penerapan SRG bisa

memperkuat cadangan pangan, yang pada akhirnya akan berimbas pada meredanya tekanan inflasi dari bahan pangan-volatile food. "Namun, dalam penerapan SRG di berbagai daerah masih terdapat beberapa kendala, diantaranya pemahaman terhadap SRG sangat kurang, infrastruktur fasilitas gudang masih terbatas, Pemda belum terlibat maksimal, serta fasilitas pembiayaan perbankan yang masih terbatas."

"SRG sebagai alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha, dalam hal ini petani, belum dimanfaatkan optimal. Karena pada awalnya, SRG diprakarsai untuk menyikapi fluktuasi harga komoditas yang merupakan timbal balik akibat fluktuasi produksi, terutama pertanian. Seperti saat panen raya terjadi harga yang rendah di tingkat petani, sebaliknya pada saat paceklik memberikan dampak harga menjadi tinggi," papar Bayu.

Namun tambahnya, karena tidak semua harga komoditas mengalami fluktuasi harga, sehingga harga menjadi



landai. Maka, hal ini yang menyebabkan SRG dianggap tidak menarik. “Tapi, SRG dapat digunakan sebagai instrumen dalam mewujudkan ketahanan dan ke-aulatan pangan, serta memperkuat logistik nasional.”

“Ke depan bisnis komoditas pertanian itu akan menjadi bisnis yang ngak ada matinya. Karena itu laporan dari Ernst & Young menempatkan Indonesia pada urutan ke tujuh di dunia. Jadi SRG ini sangat menarik secara bisnis, kalau perangkat sudah lengkap tapi swasta ngak masuk ke SRG, dia akan melewatkan kesempatan besar,” tegas Bayu.

Stabilitas Pasokan

Mekanisme SRG dan akses pasar bertujuan memperbaiki pola pemasaran komoditi, dimana harga beras jatuh pada saat panen raya dan naik tinggi saat tidak ada panen. Melalui instrumen SRG dan akses pasar diharapkan produsen akan mendapatkan pendanaan dari SRG diperiode panen raya dan pada waktu harga lebih baik, bisa dipasarkan lebih luas melalui jaringan pasar lelang sehingga harga yang didapat petani jauh lebih baik.

Namun, para pelaku usaha tersebut pada umumnya sering menghadapi masalah dalam pembiayaan, sehingga perlu peran perbankan dan Pemda agar SRG dapat menjadi salah satu instrumen dalam sistem pembiayaan perdagangan dengan memberikan payung hukum bagi pemberian kredit.

“Sejatinya perbankan sudah siap terlibat dalam pelaksanaan SRG. Semua bank sudah bisa memberikan pembiayaan dan itu berjalan,” jelas Wamendag.



Tetapi untuk menerapkan SRG diperlukan pendataan ketersediaan komoditas, jika saat ini akses informasi mengenai persediaan nasional khususnya komoditas pangan jenis beras masih minim. Sehingga ada kesimpang siuran informasi di masyarakat. Di samping itu, SRG bisa menjadi strategi guna mengantisipasi adanya spekulasi.

“Salah satu informasi yang diharapkan konsumen adalah kepastian pasokan pangan dan stabilitasi harga. Kendala selama ini selain kurangnya pasokan kelangkaan produksi, masalah lain adalah spekulasi. SRG punya manfaat besar pada konsumen,” ujarnya.

Menurut Bayu Krisnamurthi, ada dua hal yang yang dapat mendorong terjadinya spekulasi terhadap komoditas pertanian. Pertama, ketidaksempurnaan informasi atau informasi yang tertutup.

Kedua, adanya ketidakpercayaan atas kemampuan sendiri untuk melakukan sesuatu seperti invasi atau memasok.

“Sebab itu, SRG bisa menjawab dan menyelesaikan langsung kedua-duanya permasalahan yang dihadapi pasar. Sehingga harga dan kualitas juga menjadi terjamin. Serta, harga sesuai dengan kualitas yang didapatkan,” beber Bayu.

Sosialisasi

Wamendag Bayu Krisnamurthi mengakui, penerapan SRG di berbagai daerah masih banyak yang harus dikembangkan. Antara lain sosialisasi penerapan mekanisme SRG di kalangan petani dan para pemangku kepentingan harus lebih ditingkatkan lagi. “Untuk menerapkan SRG itu memang perlu ada usaha dan kekuatan besar sebagai pendorong,” paparnya.

Keterlibatan penyandang dana dalam pola SRG sangat penting, jelas Bayu. Karena tanpa andil penyandang dana, pola SRG tidak akan berjalan. Selain BUMN, pemerintah dapat pula menjadi penyandang dana melalui kredit program. Selain itu, jika SRG dikelola secara profesional, tidak mustahil akan mampu menarik minat lembaga keuangan komersial untuk ikut mendanai kegiatan ini.

“Pembagian keuntungan pembiayaan SRG dilakukan dengan pola bagi hasil, karena itu lembaga pembiayaan syariah dapat pula menjadikan pola SRG sebagai salah satu model pembiayaan yang cukup prospektif untuk digarap,” tandas Bayu Krisnamurthi. ▲





Wamendag, Bayu Krisnamurthi memberi keterangan kepada wartawan disela-sela Seminar Nasional SRG.

Kemendag Kaji SRG Garam

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mulai mengkaji penambahan komoditas yang masuk dalam mekanisme pembiayaan Sistem Resi Gudang (SRG). Selain delapan komoditas yang ada sekarang, nantinya komoditi garam juga akan masuk dalam skema pembiayaan SRG. Dengan mekanisme pembiayaan SRG, diharapkan bisa mengatasi persoalan yang dialami petani garam.

“Berdasarkan karakteristiknya, SRG bisa diterapkan untuk komoditas garam. Selama satu tahun, produksi garam berlangsung empat bulan saja atau 120-150 hari dengan masa panen tiap 10-15 hari. Dalam periode yang sempit itu garam harus dibeli, kalau tidak harganya akan jatuh,” jelas Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi kepada wartawan pada Seminar Nasional Sistem Resi Gudang di Surabaya, 20 September 2012.

Menurut Bayu, petani garam pun sangat membutuhkan pendapatan tetap dan jaminan pasar, karena itu tidak mungkin petani menyimpan garam miliknya untuk dijual di luar masa panen. “Makanya perlu ada lembaga yang bisa menjamin garam milik rakyat terserap. Tapi, sampai sekarang belum ada perusahaan yang bisa melaksanakan hal itu. Karenanya diharapkan SRG garam men-

“
Makanya perlu ada lembaga yang bisa menjamin garam milik rakyat terserap. Tapi, sampai sekarang belum ada perusahaan yang bisa melaksanakan hal itu. Karenanya diharapkan SRG garam menjadi solusi permasalahan petani garam.
”

jadi solusi permasalahan petani garam.”

Tantangan yang dihadapi sekarang tambah Bayu, yakni adanya pihak atau perusahaan yang bisa membeli semua garam rakyat dalam periode singkat, lalu dijual untuk kebutuhan sepanjang tahun. Padahal, tidak semua perusahaan memiliki pembiayaan yang kuat. Karena itu, adanya SRG garam akan membantu dari sisi pembiayaan.

Bayu meyakini, SRG garam dapat mendukung kebijakan Kemendag terkait harga penjualan garam. Seperti diketahui, Peraturan Dirjen Perdagangan Luar

Negeri No. 2/2011, menetapkan harga penjualan garam kualitas 1 di tingkat petani minimal Rp 750 per kg dari sebelumnya Rp 325 per kg. Sedangkan garam kualitas 2 minimal Rp 550 per kg dari sebelumnya Rp 250 per kg.

Dalam kesempatan yang sama, Dirut PT Garam Yulian Lintang mengatakan pihaknya siap menindaklanjuti kebijakan SRG garam. Yulian menjelaskan, kesiapan tersebut salah satunya menyangkut keberadaan gudang yang memadai.

“Kami siap membeli berapa pun yang diminta pemerintah. Sebab, dari sisi fasilitas gudang sudah tersedia, sehingga tidak menjadi masalah,” ujarnya.

Menurut Yulian Lintang, gudang milik PT Garam tersebar di sejumlah daerah di Madura seperti di Sampang, Pamekasan dan Sumenep dengan kapasitas daya tampung mencapai 200 ribu ton.

Selain itu, pihaknya mengklaim membeli garam rakyat dengan harga lebih tinggi yaitu mencapai Rp 675 per kg. Ke depan, stabilitas harga garam akan terus meningkat seiring dengan habisnya stok garam impor. PT Garam mencatat penyerapan garam rakyat hingga Agustus lalu sebanyak 67 ribu ton. Ditargetkan sampai Desember nanti bisa mencapai 200 ribu ton. ▲



SRG Award 2012

Bappebti selain menyelenggarakan Seminar Nasional Sistem Resi Gudang Sebagai Alternatif Pembiayaan bagi Pelaku Usaha dan Pengendali Inflasi Daerah, pada 20 September 2012, di Surabaya, Jatim, juga menganugerahkan penghargaan kepada sebanyak 17 instansi diantaranya terdiri dari Pemerintah Daerah, Gapoktan, lembaga pengelola gudang dan penguji mutu.

Penghargaan yang diserahkan Wamendag Bayu Krisnamurthi itu ditujukan untuk meningkatkan motivasi para pelaku SRG di berbagai daerah. Di sisi lain, menjadi tolak ukur keberhasilan Pemda atau instansi terakut dalam implementasi SRG. Dengan demikian para penerima penghargaan tersebut dapat menjadi raw model penyelenggaraan SRG di tanah air. ▲

Rumusan Hasil Seminar Nasional SRG 2012

1. Selain sebagai instrumen penekan fluktuasi harga komoditi, Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan instrumen manajemen resiko, alternatif pembiayaan dan memiliki potensi sebagai pengendali inflasi daerah.
2. Pengembangan pelaksanaan SRG merupakan tugas bersama, sehingga harus didukung dan didorong bersama oleh lembaga dan instansi yang berperan pada masa pra-panen, panen dan pasca panen, baik pemerintah, swasta, akademisi yang berada di pusat maupun

daerah.

3. Pengetahuan dan pemahaman teknis pelaksanaan SRG masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi lintas sektoral kepada masyarakat, pelaku usaha, akademisi maupun dunia perbankan.
4. Dalam pengembangan dan perluasan pelaksanaan SRG diperlukan trobosan-trobosan untuk mengatasi kendala dan hambatan yang masih ada. Dukungan kebijakan yang sinergis dari lembaga/instansi pemerintah pusat maupun daerah sangat diperlukan.





Syahrul R. Sempurnajaya : **Aparatur Hukum Harus Seirama Dengan Bappebti**

Aparatur hukum di daerah juga memiliki kewajiban menegakan peraturan perdagangan berjangka komoditi sesuai undang-undang, karenanya perlu koordinasi dan sinkronisasi.

UU No. 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi yang telah mengalami perubahan menjadi UU No. 10 Tahun 2011, agaknya belum akrab dan melekat bagi aparat penegak hukum. Akibatnya, sejumlah permasalahan yang ditemukan di lapangan tidak terselesaikan dengan baik dan tuntas. Setidaknya hal itu tampak dari rapat koordinasi aparat penegak hukum di Kota Medan, Sumut, yang diselenggarakan Bappebti, 27 September 2012.

Rapat koordinasi yang dibuka Kepala Bappebti Syahrul R. Sempurnajaya, itu, diikuti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara, Polda Daerah Propinsi Sumatera Utara, Kasubdit Indag Reskrimsus Kepolisian wilayah Propinsi Sumatera Utara, Korwas PPNS Sumatera Utara, Kajati Sumatera Utara, Kajari Sumatera Utara, dan civitas akademika Univ. Khatolik St. Thomas Sumatera Utara.

Menurut Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, dalam sambutannya mengatakan, Kota Medan dan wilayah Sumatera Utara pada umumnya merupakan salah satu daerah potensial pengembangan industri perdagangan berjangka komoditi di tanah air. Mengingat wilayah Sumatera Utara merupakan sentra produksi sejumlah komoditi unggulan dan berkembangnya sektor

jasa keuangan.

“Wilayah Sumatera Utara berkontribusi besar dalam perkembangan industri perdagangan berjangka komoditi di tanah air. Terbukti dengan berdirinya sejumlah kantor cabang perusahaan pialang berjangka di Kota Medan ini. Sebab itu, aparat penegak hukum perlu seirama dan seirama dengan Bappebti dalam penerapan UU No. 10 Tahun 2011,” jelas Syahrul.

Lebih jauh ditegaskan Syahrul, UU No. 10 Tahun 2011 merupakan produk hukum universal yang berlaku di seluruh wilayah NKRI. Jadi, tidak semata-mata kepentingan Bappebti dan industri perdagangan berjangka komoditi. “Dalam penerapan UU itu, Bappebti hanya sebagai instansi pengawas dan pembina terlaksananya perdagangan berjangka komoditi yang transparan dan fair di tanah air.”

“Kalau ada oknum yang terbukti melakukan praktik ilegal perdagangan berjangka komoditi, maka pihak Kepolisian lah yang menangkap, dan pihak Kejaksaan yang menuntutnya hingga diputuskan oleh hakim untuk menjalani kurungan penjara dan denda materi,” tambahnya.

“Karena itu, Bappebti sangat berkepentingan agar seluruh aparat penegak hukum di berbagai daerah memahami dan menguasai UU No. 10 Tahun 2011. Sehingga UU tersebut memiliki roh yang

bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan menjamin para pelakunya dalam bertransaksi perdagangan berjangka komoditi,” imbuh Syahrul R. Sempurnajaya.

Di samping itu, diskusi penerapan UU No. 10 Tahun 2011 dengan aparat penegak hukum Sumut dikendalikan Kepala Biro Hukum, Bappebti, Alfons Samosir. Dalam diskusi tersebut terungkap sejumlah permasalahan faktual di lapangan. Seperti, munculnya sejumlah pihak menawarkan investasi perdagangan berjangka secara on line. Dalam kaitan itu, Alfons Samosir dengan tegas mengatakan, UU No. 10 Tahun 2011, mengatur pihak-pihak yang memperoleh izin dari Bappebti. “Untuk mengetahui perusahaan pialang berjangka berizin resmi dapat dilihat melalui website Bappebti.”

Menegakan peraturan sesuai undang-undang, hetat kami tambah Alfons, tidak perlu berdasarkan laporan masyarakat yang telah mengalami kerugian atau atas tindakan ilegal. Sebab, umumnya masyarakat yang merugi enggan untuk melaporkannya ke pihak berwenang dengan berbagai alasan.

“Jika ada pihak yang menawarkan transaksi perdagangan berjangka komoditi tidak memiliki izin resmi dari Bappebti, tentunya sudah melanggar UU No. 10 Tahun 2012. Jadi, aparat penegak hukum di daerah tidak perlu ragu untuk menegakan peraturan dan menindaknya,” kata Alfons Samosir. ▲



Polda Sumsel Miliki 'PR' Berantas Praktik Ilegal PBK



2012/09/20

Palembang, Sumatera Selatan, merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak catatan buruk di bidang investasi on-line dengan praktik perdagangan berjangka komoditi. Tingkat kerugian masyarakat diperkirakan mencapai Rp 6 triliun. Terkait itu, saat ini ada sebanyak enam pihak atau perusahaan yang dilaporkan masyarakat ke Polda Sumsel.

"Dalam catatan kami, saat ini ada sebanyak enam perusahaan yang dilaporkan masyarakat dan Dit Reskrimsus Polda Sumsel tengah menanganinya," demikian diungkapkan AKBP Kasubdit I Indagsi, Polda Sumsel, Dewa Putu Gede Artha, disela-sela Rapat Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum Wilayah Sumatera Selatan yang diselenggarakan Bappebti pada tanggal 20 September 2012, di Hotel Jayakarta Daira, Palembang.

Rapat koordinasi itu dibuka Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakilinya. Di pihak lain juga hadir Aspidum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan beserta staf, para Pejabat dari Biro Hukum Bappebti beserta staf, PPNS dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan maupun kota Palembang, Biro Hukum Pemda Provinsi Sumatera Selatan, Kasubdit Indagsi Dit. Reskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan beserta jajarannya, Kasat Reskrim Polresta Palembang, Korwas PPNS Polda Sumsel, perwakilan Kejaksaan Negeri Palembang, perwakilan Universitas Sriwijaya, dan Ketua Yayasan

Lembaga Konsumen Indonesia Sumatera Selatan.

Lebih jauh diutarakan Dewa Putu Gede Artha, akibat praktik ilegal yang dilakukan perusahaan itu total kerugian masyarakat mencapai Rp 6 triliun. "Kami menduga modus yang digunakan perusahaan itu yakni penawaran investasi di bidang perdagangan berjangka."

"Polda Sumsel sudah pernah mengintrogasi PT. FM dan PT.SIM. Namun belum tuntas," kata Dewa.

Di sisi lain, ada kalanya masyarakat tidak segera melapor ke pihak berwajib atas kerugian yang dialaminya, tambah Dewa. "Karena, masyarakat yang merugi diancam uang tidak dikembalikan jika melapor ke Polri."

Tetapi setelah pengurus perusahaan itu sudah tidak ada ditempat atau kabur ke luar kota, masyarakat baru melapor. Akhirnya, kami kesulitan untuk menuntaskan kasus yang menimpa masyarakat tersebut, jelas Dewa.

"Korban investasi ilegal itu tidak saja dari kalangan masyarakat awam. Tetapi juga ada dari kalangan Pemda, bahkan aparat Kepolisian Sumsel," beber Dewa Putu Gede Artha.

Sosialisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, terkait maraknya praktik ilegal perdagangan berjangka di wilayah itu mengatakan, langkah efektif menekan tingkat kerugian masyarakat yakni sosialisasi.

"Lebih baik mencegah dari pada mengobati. Kalau masyarakat sudah jadi

korban dari praktik itu ilegal itu, maka apa yang bisa dilakukan? Pelakunya pun sudah tidak jelas keberadaannya. Hendak melapor kepihak berwajib, tentu memakan waktu untuk mengkajinya, dan disaat yang sama pelaku sudah melarikan diri," jelas wakil Diperindag Sumsel.

"Jadi hemat kami, salah satunya agar dilakukan sosialisasi kepada pihak terkait tentang perdagangan berjangka komoditi, seperti kegiatan rapat koordinasi ini. Di samping itu, ada koordinasi yang intensif antara Bappebti dengan Diperindag Provinsi Sumatera Selatan," jelasnya.

Di sisi lain, Diperindag Sumsel menyarankan Bappebti agar membuat peta dan tata cara penanganan kasus praktik ilegal perdagangan berjangka komoditi. Hal itu agar lebih mempermudah dan mempercepat pelaksanaan penanganannya. Sehingga masyarakat dapat dilayani dan mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Di lain pihak, Aspidum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, juga menyarankan dalam setiap rakor perlu diundang hakim dari Pengadilan Negeri, sebab hakim yang menangani perkara di bidang perdagangan berjangka secara langsung di pengadilan.

"UU Perlindungan Konsumen dapat diterapkan dalam perkara di bidang perdagangan berjangka karena nasabah di bidang perdagangan berjangka dapat disamakan sebagai konsumen seperti halnya konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen," jelasnya. ▲





JFX Center Upaya Tingkatkan Likuiditas Bursa



Dirut JFX, Made Soekarwo, Kabag Pengawasan Transaksi Bappebti, Widiastuti berfoto bersama dengan civitas Undip di JFX Center Undip.

Pialang berjangka dan pedagang berjangka anggota Jakarta Futures Exchange (JFX) belum seluruhnya bertransaksi kontrak multilateral akibatnya volume transaksi untuk golongan ini masih rendah. Dirut JFX, Made Soekarwo, mengatakan transaksi perdagangan berjangka di JFX ini masih relatif rendah. Meski pun ada peningkatannya, namun belum sesuai dengan harapan minimal 5 % seperti ditentukan otoritas perdagangan berjangka komoditi.

“Transaksi di JFX selalu meningkat meskipun kecil. Misalnya, total volume transaksi Juli 2012 untuk multilateral dan bilateral, mencapai 593.547 lot, mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya yang hanya 576.765 lot,” ujar Made disela-sela peresmian JFX Center di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Menurut Made, rendahnya transaksi di JFX terutama untuk transaksi kontrak multilateral. Hal itu dikarenakan perusahaan pialang maupun pedagang bursa berjangka yang aktif untuk bertransaksi masih minim.

“Dari sebanyak 56 perusahaan pialang, yang aktif melakukan transaksi multilateral hanya sebanyak 37 perusahaan. Di sisi lain, dari sebanyak 15 pedagang bursa berjangka yang aktif melakukan transaksi hanya sebanyak 8

perusahaan. Inilah menjadi salah satu faktor minimnya volume transaksi selama ini,” tutur Made.

Masih minimnya transaksi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya investor yang menggeluti bisnis perdagangan berjangka komoditi, juga disebabkan pengetahuan yang dimiliki oleh calon investor masih rendah.

“Hal itu masih ditambah dengan image atau citra buruk bursa berjangka di mata masyarakat akibat ulah perusahaan pialang nakal yang tidak berizin yang sering melakukan penipuan kepada investor,” katanya.

Ditambahkan Made Soekarwo, masyarakat perlu diberikan edukasi yang lebih banyak agar terhindar dari tindakan praktik ilegal. Selain itu, dengan seminar atau lokakarya termasuk pedirian JFX Center di sejumlah tempat terutama kampus-kampus.

JFX Center Undip

Sementara itu, berdirinya JFX Center di Undip merupakan hasil kerjasama Magister Manajemen Universitas Diponegoro dan perusahaan pialang PT Monex Investindo Futures. JFX Center di Undip merupakan JFX Center ke-enam, dari total 10 JFX yang didirikan sepanjang tahun ini.

“Kami ingin mengenalkan perdagangan berjangka komoditi sedini mungkin kepada mahasiswa, sehingga kelak

mampu mengembangkan industri ini, serta agar tidak menjadi korban pialang ilegal atau abal-abal yang tidak terdaftar di JFX maupun Bappebti,” imbuh Made Soekarwo.

Senada dengan Made Soekarwo, Direktur Pogram Magister MM Undip Semarang, Sugeng Wahyudi, mengatakan, hadirnya JFX Center diharapkan sebagai sarana menimba ilmu yang lebih lengkap dengan meresapi dunia usaha yang nyata.

“Kami pun sangat berharap nantinya para mahasiswa dapat lebih memahami praktik perdagangan berjangka komoditi melalui JFX Center. Sehingga ketika mereka selesai dari bangku kuliah bisa memiliki gambaran tentang bisnis perdagangan berjangka komoditi. Atau, nantinya mereka berminat mengembangkan karier di industri perdagangan berjangka komoditi,” harap Sugeng Wahyudi.

Dipihak lain, Banch Manager PT Monex Investindo Futures Cabang Semarang, Ronald Candra, mengatakan, sangat mendukung dengan hadirnya JFX Center sebagai sarana pengenalan perdagangan berjangka komoditi pada masyarakat sehingga semakin dikenal dan dapat turut andil dalam mengerjakan perekonomian nasional.

“Peresmian JFX Center di Magister Manajemen Undip ini bakal menjadi wahana mahasiswa mengenal langsung perdagangan berjangka komoditi dengan cara melakukan simulasi perdagangan, studi kepustakaan, maupun seminar-seminar yang akan diadakan oleh JFX Center dan PT.Monex Investindo Futures Semarang,” jelas Ronald.

Lebih jauh diutarakan Ronald, selain mahasiswa Undip, fasilitas JFX Center ini juga dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, pelaku usaha maupun perusahaan-perusahaan yang berminat mengetahui seluk beluk mengenai perdagangan berjangka komoditi dan ingin mendapatkan manfaat dari kehadiran bursa berjangka dengan produk-produk yang disediakan. ▲



Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Gita Wijawan, saat mengunjungi Gudang SRG. Cianjur, 6 Juli 2012.

Kredit SRG Cianjur Capai Rp 5,2 miliar

Gudang SRG Cianjur pada September 2012 terbitkan 56 Resi Gudang dengan total nilai kredit mencapai Rp 5,2 miliar.

Gudang Warungkondang merupakan gudang yang dibangun pada tahun 2009 dan digunakan sebagai gudang SRG (Sistem Resi Gudang) satu-satunya di Cianjur sejak tahun 2011. Letaknya berada di Kecamatan Warungkondang, dan secara geografis sangat strategis karena menjadi pusat pertanian padi pandan wangi di Kabupaten Cianjur.

Awal September lalu, Kementerian Perdagangan menetapkan SRG Cianjur menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Penghargaan ini diberikan karena sistem pengelolaan SRG Cianjur dapat berjalan baik. Tentu saja, hal ini tidak lepas dari kerja keras Pemkab Cianjur yang terus membenahi dan mensosialisasikan SRG kepada Masyarakat.

Menurut Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Cianjur, Himam Harris, masyarakat Cianjur sudah mengetahui dan merasakan manfaat dari keberadaan SRG sebagai salah satu instrumen pembiayaan melalui mekanisme tunda jual. Saat ini, sudah ada 4 gapoktan yang berperan aktif dalam SRG.

“Kami sangat mengapresiasi peran petani Cianjur yang memanfaatkan Sistem Resi Gudang (SRG). Meskipun

masyarakat sudah banyak yang menyadari pentingnya SRG, tapi sosialisasi tetap akan kami lakukan untuk lebih mendongkrak potensi SRG,” kata Himam, di Cianjur.

Himam menuturkan, jumlah resi gudang yang dikeluarkan hingga akhir September mencapai 56 resi.

“Semua resi tersebut sudah dijamin ke Bank Jabar dengan jumlah pembiayaan mencapai Rp 5,2 miliar,” ungkap Himam.

Tercatat pada tahun 2011, stok gabah dalam gudang Warungkondang hanya sekitar 412 ton. Namun, dengan gencarnya sosialisasi membuat masyarakat justru berlomba untuk menyimpan hasil pertaniannya. “Hingga akhir September 2012, jumlah total stoknya mencapai 1013 ton gabah. Kondisi ini membuat gudang Warungkondang sudah over kapasitas, jadi kami tidak dapat menampung lagi gabah petani lain. Selain itu, mesin dryer pengering gabah juga hanya ada satu,” ungkapnya.

Untuk itu, kata Himam, rencananya akan diadakan kerjasama dengan pihak swasta untuk penggunaan gudang selain di Warungkondang. “Kita akan menggandeng pihak swasta untuk mensiasati minimnya kapasitas gudang yang ada,”

katanya.

Sejauh ini, jelas Himam, pihaknya masih melakukan proses kesepakatan dengan pihak swasta. “Dari pihak swasta memang sudah ada yang bersedia, kapasitas gudangnya mencapai 2 ton.”

Terkait harga gabah kering giling (GKG) saat ini, kata Himam, harganya berkisar Rp 4200 hingga Rp 4500 per kg. Dari harga tersebut, petani dapat memperoleh keuntungan bersih sekitar Rp 600 per kg.

“Untuk di bulan Desember, banyak petani yang berharap keuntungannya dapat lebih baik, minimal mencapai Rp 1000,” kata Himam.

Sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Barat, SRG memang sangat penting untuk terus dikembangkan di Cianjur. Mengutip data Kementerian Pertanian, Sejak Januari-Agustus 2012, produksi padi Kabupaten Cianjur mencapai sekitar 758.515 ton dari luas tanam 81.749 hektare dan luas panen 136.042 hektare.

Sementara Pada 2011, jumlah produksi padi mencapai 839.776 ton dari luas tanam 157.750 hektare dan luas panen 144.913 hektare. Sedangkan 2010, jumlah produksi padi mencapai 915.266 ton dari luas tanam 149.874 hektare dan luas panen 164.647 hektare. ▲





Batola Terbitkan 21 Resi Gudang

Gudang SRG Batola pada September 2012 terbitkan 21 Resi Gudang dan 14 diantaranya dijadikan jaminan pembiayaan dengan nilai lebih dari Rp 683 juta.

Langkah demi langkah untuk mendorong pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG), terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para petani. Alhasil, keseriusan dan tekad Pemkab Batola dapat berbuah manis dengan dianugerahkannya penghargaan SRG Award dari Kementerian Perdagangan, September lalu.

Penghargaan tersebut, berdasarkan penilaian bahwa pelaksanaan SRG Batola telah berjalan baik dan berhasil membidik sasarannya. "Kami melihat target dalam pengguna Resi Gudang Batola sangat akurat dan tepat sasaran," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi UKM (Kadis Perindagkop dan UKM) Batola, H M Hasbi, beberapa waktu lalu.

SRG Batola yang sudah berjalan sejak tahun 2010 itu, kata Hasbi, telah menyentuh petani, kelompok tani, koperasi, UMKM dan pelaku usaha yang bergerak di bidang komoditi pertanian di Batola.

"Kami terus mengadakan sosialisasi dan mendorong integrasi petani yang sinergis untuk mensukseskan SRG," jelasnya.

Hasbi menuturkan, realisasi komoditas yang disimpan di gudang SRG Batola periode Juni hingga akhir September, mencapai 500 ton gabah milik 25 poktan dan koperasi. Kendati stok gabah

hanya mencapai 500 ton, Hasbi meyakini, volumenya akan terus bertambah. "Saat ini, masih banyak gabah dalam proses masuk gudang. Diprediksi akhir bulan Oktober akan mencapai 800 ton," katanya.

Sementara itu, harga gabah kering giling (GKG) dalam transaksi resi gudang Batola mencapai Rp 4300 per kilogram, dan tercatat jumlah resi yang dikeluarkan mencapai 21 resi.

"Dari jumlah resi yang dikeluarkan tersebut, yang digunakan menjadi agunan untuk mendapatkan kredit mencapai 14 resi dengan total nilai kredit sebesar Rp 683.499.995," terang Hasbi.

Hasbi juga mengatakan, pengucuran kredit yang berasal dari Bank Kalsel hingga akhir bulan Oktober, diprediksi tembus di atas Rp 1 miliar. "Kami optimis nilai kredit mencapai di atas Rp 1 miliar," tegasnya.

Lebih lanjut, Hasbi menerangkan, ada dua faktor yang menjadi kunci keberhasilan SRG Batola. Pertama, SRG digagas dan didukung langsung oleh Bupati Barito Kuala, H. Hasanuddin Murad. "Berkat gagasan dari Bupati Batola langsung pada awal masa jabatannya yang menjadi satu dari implementasi visi dan misi Pemkab Batola."

Kedua, jajaran Disperindagkop Pemkab Batola selaku pengelola SRG tidak cepat dimutasi. Karena Hasbi melihat, sebagai pengelola yang diberi

tanggung jawab menjalankan program SRG harus memiliki pemahaman yang mendalam. "Mempelajari SRG bukanlah hal yang instan. Untuk itu, butuh waktu dalam mempelajari program ini agar dalam implementasi SRG dapat berjalan dengan baik," ungkap Hasbi.

Tak berpuas diri, Pemkab Batola juga tetap gencar melakukan sosialisasi untuk meningkatkan SRG. Karena Kabupaten Batola merupakan sentra produksi padi terbesar di Kalimantan Selatan, yang sering dihadapkan pada masalah anjloknya harga gabah hingga pada tingkat yang tidak menguntungkan.

Hal ini disebabkan fluktuasi harga komoditi yang ditunjukkan dengan harga yang rendah pada musim panen, dan harga tinggi pada musim tanam sehingga tidak menguntungkan petani dan melemahkan sektor pertanian. Tercatat, produksi padi Batola pada 2011 sebanyak 350.000 ton gabah kering giling dari luas tanam 98.100 ha.

SRG, kata Hasbi, sangat banyak manfaatnya bagi para petani. Diantaranya, memperkecil fluktuasi harga, di mana petani tidak perlu menjual barangnya segera setelah panen yang biasanya harganya sangat rendah. "Petani juga mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit dari perbankan, karena Resi Gudang dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan kredit," pungkas H. M. Hasbi. ▲



Pacu Ragam Komoditas, Upaya Dongkrak Transaksi

Capaian transaksi PLKA Sulut periode ke-8 mencapai Rp 11,076 miliar. Dengan komitmen Pemprov Sulut, angka transaksi dalam pelaksanaan pasar lelang berikutnya diharapkan mampu meningkat.

Pasar Lelang Komoditi Agro (PLKA) merupakan sarana ampuh untuk mempertemukan produsen dengan calon pembeli. Bahkan, menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulawesi Utara (Sulut), Sanny Parengkuan, komoditas yang ditawarkan dalam pasar lelang banyak juga yang dilirik para eksportir.

Pelaksanaan PLKA Sulut, memang semakin berjalan baik. Tapi, kegiatan ini akan terus ditingkatkan dengan menambah daftar aneka komoditas baik pertanian, perkebunan, perikanan hingga produk industri kecil menengah (IKM), sehingga volume transaksinya pun terkatrol naik. Selain itu, keikutsertaan daerah lain untuk terlibat dalam pelaksanaan pasar lelang, menjadi poin penting yang akan diusahakan Sulut untuk mendongkrak nilai transaksi.

Itulah komitmen Pemerintah Provinsi Sulut sebagaimana dijelaskan Sanny Parengkuan, saat acara PLKA yang ke-8 di tahun 2012, di Manado, September lalu. "Kegiatan ini akan terus disosialisasikan kepada para calon penjual dalam hal ini petani atau produsen," katanya.

Sementara itu, dalam pelaksanaan pasar lelang ke-8, Sulut berhasil membukukan 11 transaksi dengan total transaksi mencapai Rp 11,076 miliar. "Komoditi jagung merupakan komoditi dengan jumlah transaksi terbesar yakni sebesar Rp 6,62 miliar dengan volume mencapai

2.500 ton," terang Sanny.

Selain jagung, Sanny mengatakan, cengkeh berada dalam posisi kedua dengan jumlah transaksi sebanyak Rp 2,54 miliar untuk 24 ton dengan harga Rp 106 ribu per kilogram. Kemudian disusul komoditi ikan sebesar Rp 1,359 miliar atau 12,27 persen dari total transaksi. "Sedangkan komoditi lainnya seperti beras, gabah kering panen, kopra, telur itik dan udang lobster masing-masing menciptakan transaksi di bawah Rp 1 miliar," jelasnya.

Cengkeh Rp 106 ribu/Kg

Dalam pelaksanaan PLKA periode ke-8 yang berlangsung di Hotel Sahid Kawanua Manado, Sulut, cengkeh kering berhasil diperdagangkan pada harga sebesar Rp 106 ribu per Kg. Padahal, harga di pasaran pedagang lokal di Manado hanya berkisar Rp 104 ribu hingga Rp 105 ribu per kg. Tercatat, cengkeh berada dalam posisi kedua dengan jumlah transaksi sebanyak Rp 2,54 miliar untuk 24 ton dengan harga Rp 106 ribu per kg.

"Cengkeh menjadi salah satu komoditas unggulan sektor perkebunan yang telah mampu memberi kesejahteraan kepada petani Sulut. Terciptanya harga cengkeh sebesar Rp 106 ribu per kg, memberi optimisme kepada petani bahwa komoditas unggulan masyarakat Sulut tersebut berpotensi naik di waktu mendatang," kata Pelaksana Pasar Lelang

Sulut, Johana Maweikere.

Menurut Johana, cengkeh yang diperdagangkan pada pasar lelang merupakan hasil produksi petani di Kabupaten Minahasa pada panen tahun ini. Adapun total produksi cengkeh petani Sulut pada kondisi normal dapat mencapai 15 ribu ton, atau mampu mencapai seperempat dari produksi nasional yang berkisar 50 ribu hingga 60 ribu ton setiap tahun. "Selain dibutuhkan oleh produsen rokok, cengkeh juga menjadi salah satu bahan baku untuk berbagai produk obat," papar Johana.

PLKA On-line

Memulai debut Pasar Lelang Komoditi Agro (PLKA) sejak 2004, Sulut sudah mampu membukukan transaksi lebih dari Rp 500 miliar di tahun itu. Dari tahun ketahun, PLKA Sulut semakin diminati dengan melihat angka transaksi yang kian meningkat.

Untuk itu, agar pelaksanaan pasar lelang dapat dijalankan dengan baik, Kepala Disperindag Sulut, Sanny Parengkuan, mengatakan, PLKA Sulut pada dua atau tiga tahun ke depan akan diarahkan pada satu sistem online.

"Kami masih terus berupaya untuk memberdayakan petugas pasar lelang dalam mempersiapkan sistem perdagangan pasar lelang online, yang rencananya akan diluncurkan dua atau tiga tahun mendatang" pungkas Sanny Parengkuan. ▲





Agenda Foto



Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya, dialog interaktif dengan narasumber lain Dirut BKDI, Megain Widjaya, Guru Besar Unila, Bustanul Arifin, dengan topik bursa regional Asia di TV Kabel Berita Satu. **JAKARTA, 17 September 2012.**



Sekretaris Bappebti, Nizarli, didampingi Kepala Biro Pasar Fisik & Jasa Bappebti, Ismadjaja Toengkagie, membuka pelatihan teknis calon pengelola Gudang SRG dari sejumlah daerah. **SURABAYA, 18-20 September 2012.**



Kabag Pelanggaran Transaksi Bappebti, Veri Anggrijono dan Kabag Pelayanan Hukum Bappebti, Sri Haryati, membuka rapat kordinasi aparat penegak hukum di bidang perdagangan berjangka di Palembang. **PALEMBANG, 20 September 2012.**



Agenda Foto



Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya, berfoto bersama dengan narasumber Seminar Nasional SRG, Guru Besar Unila, Bustanul Arifin, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Agus Suprijanto dengan moderator Kapus Harmonisasi Kebijakan Perdagangan Kemendag, Sutriyono Edi. **SURABAYA, 20 September 2012.**



Sekretaris Bappebti, Nizarli, menyampaikan arahan pada pelaksanaan Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka Angkatan ke-4 dengan peserta sebanyak 175 orang yang berasal dari berbagai perusahaan pialang. **YOGYAKARTA, 7-8 September 2012.**



Bappebti menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan di bidang perdagangan berjangka pada pelaku perdagangan berjangka DI Yogyakarta kegiatan ini diikuti sebanyak 200 peserta dengan narasumber praktisi perdagangan berjangka dan pejabat Bappebti. **YOGYAKARTA, 14-15 September 2012.**





Waspada Aktivitas GBI Afiliasi Geneva

Genewa, perusahaan perdagangan emas di Malaysia dan Singapura, telah digerebek oleh otoritas terkait di kedua negara tersebut, lantaran tidak mampu memenuhi kewajiban kepada nasabahnya dalam beberapa bulan terakhir. Media theedgemalaysia.com mewartakan, Geneva saat ini tidak dapat beroperasi karena masih menunggu hasil penyelidikan.

Geneva dikabarkan memiliki 11 kantor di Malaysia, juga memiliki perusahaan di Singapura, Filipina, Cina, Thailand dan Indonesia.

Untuk mengetahui aktivitas Geneva di Indonesia, Tim Redaksi mencoba menelusuri melalui media digital dan menemukan situs resminya yaitu genewa-indonesia.com. Dan, perusahaan ini dikenal dengan Gold Bullion Indonesia (GBI). Dalam situsnya tertulis, GBI merupakan sebuah merk dagang yang bergerak di bidang jual-beli emas atau logam mulia berbasis syariah. Situs itu memang tidak update, tetapi ternyata

GBI memiliki situs resmi lainnya yaitu goldbullionindonesia.biz.

Di Indonesia, GBI berkantor pusat di Jl. Ciputat Raya No.99, Pondok Pinang, Keb. Lama, Jakarta Selatan. Sedangkan kantor cabangnya terdapat di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Bandung, Surabaya, Malang, Semarang, Makassar dan Medan.

Dalam aktivitasnya, GBI menawarkan investasi emas dengan ukuran 50 gr, 100 gr, 250 gr dan 1 kg. Dalam investasi tersebut, GBI menjanjikan nilai bonus (athaya) nasabah sebesar 2,5 % per bulan dari harga emas selama 4 bulan berturut-turut. Selanjutnya, nasabah dapat memperbaharui kontrak dengan menjual emasnya kembali (buyback).

Menelusuri situs resmi GBI, pihak manajemen gandeng Majelis Ulama Indonesia. Hal itu tampak dari peresmian kantor pusat dan cabang GBI. Serta, MUI menyerahkan sertifikat syariah dari Dewan Syariah Nasional. Penyerahan sertifikat itu langsung diberikan Ketua Majelis Ulama Indonesia, K.H. Ma'ruf

Amin.

GBI mulai beraktivitas di Jakarta sejak Januari 2012 dan menyusul kantor cabang lainnya diberbagai kota. Dalam aktivitasnya itu, GBI tidak mengantongi izin resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) atau pun dari instansi terkait dengan aktivitasnya. ▲



RI Bisa Pimpin Karet Dunia



Industri karet Indonesia ke depan bisa menjadi pemimpin dalam pengelolaan suplai dan produksi komoditas perkebunan tersebut di dunia, kata Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi.

"Indonesia merupakan negara yang paling memiliki kesempatan besar dalam industri karet, baik secara kualitas maupun kuantitas. Indonesia sebagai salah satu produsen besar karet memiliki posisi lebih baik dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia. Ketiga negara ini merupakan produsen karet terbesar di dunia," kata Bayu disela-sela Konferensi Nasional Karet 2012 di Yogyakarta.

"Produksi karet di ketiga negara tersebut sekitar 85 % dari total produksi dunia. Namun, Indonesia memiliki kes-

empatan paling besar untuk memimpin industri karet dunia," katanya.

Menurut Bayu, pada 2011 dengan luas areal perkebunan karet 3,4 juta hektare dan produksi karet 2,8 juta ton, Indonesia menempati posisi kedua setelah Thailand sebagai produsen karet alam di dunia.

"Karet sebagai bahan baku industri ban berperan penting dalam mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru di Indonesia. Karena itu, konferensi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perkebunan karet nasional dan mutu bahan olah karet serta pengembangan industri barang jadi karet di dalam negeri," beber Wamendag Bayu Krisnamurthi. ▲



Kontribusi Kontrak Kakao JFX 30 %



Kontrak berjangka komoditi kakao di Jakarta Futures Exchange (JFX) semakin diminati para investor. Menurut Direktur JFX, Roy Sembel, seluruh transaksi kakao di BBJ rata-rata sebanyak 300 lot per hari.

“Sejak diluncurkan pada akhir Desember tahun 2011, lalu, kontrak berjangka komoditi kakao mampu menyumbang sekitar 20 hingga 30 % dari seluruh kontrak di JFX,” jelas Roy Sembel.

Meski kontrak kakao masih tergolong baru, kata Roy, peminat kontrak kakao sudah cukup tinggi. Investor itu berasal dari produsen, pengusaha pabrik maupun kalangan spekulan. “Kontrak kakao ini cukup menarik untuk diversifikasi kontrak selain emas,” papar Roy.

Kontrak kakao di JFX terdiri dari lima jenis masa jatuh tempo. Masa jatuh tempo terdekat adalah September 2012, dan beberapa kontrak lainnya yang memiliki masa jatuh tempo pada bulan Desember 2012, Maret 2013, Mei 2013 dan Juli 2013.

Seperti kontrak berjangka pada komoditas lain di JFX, investor tetap bisa memperoleh keuntungan karena kontrak tersebut diperdagangkan di bursa permintaan dan penawaran.

Investor yang lebih suka melakukan trading, bisa memanfaatkan pergerakan harga untuk mengambil posisi jual atau beli.

“Meski pun bursa saham sedang dalam kondisi turun, namun dengan bertransaksi di bursa berjangka, investor tetap bisa memperoleh keuntungan,” ungkap Roy Sembel. ▲

SRG Karo & Serdang Bedagai Siap Operasi

Dua kabupaten di Sumatra Utara, yaitu Kab. Karo dan Kab. Serdang Bedagai, ditargetkan hingga akhir tahun 2012 ini mengaplikasikan sistem resi gudang (SRG) untuk perdagangan komoditas pertanian.

“SRG di Sumut akan segera berjalan di akhir tahun ini. Tetapi tidak semua gudang akan aktif, melainkan hanya dua gudang saja, yakni gudang di daerah Kab. Karo dan Serdang Bedagai,” ujar Ketua Bulog Sumut Nasrun Rahmani, baru-baru ini.

Lebih jauh, Nasrun Rahmani mengemukakan, SRG sangat mendesak dilakukan untuk mempermudah petani mendapatkan kredit perbankan karena petani bisa menarik modal dengan menjaminkan resi gudang yang diterbitkan pemilik gudang. Selain itu, SRG membantu petani mengatasi fluktuasi harga karena pada musim panen hasil pertanian masih dapat disimpan di gudang se-

hingga tidak ada kelebihan pasokan di pasar. Di saat yang sama, petani dapat menarik kredit dengan menjaminkan dokumen resi gudang.

“Dengan SRG ini petani Sumut tidak akan terburu-buru menjual berasnya lagi ke tengkulak, serta tidak perlu meminjam ke rentenir,” tambahnya.

Nasrun menjelaskan, secara teknis tata cara mendapatkan resi gudang adalah dimulai dari petani memberikan hasil panen untuk disimpan ke gudang yang sudah ditunjuk, setelah itu pemilik gudang akan menerbitkan dokumen resi gudang.

Nilai resi gudang itu, tutur Nasrun Rahmani, setara dengan harga komoditas hasil panen. Petani bisa menarik dana dari bank yang ditunjuk dengan menukarkan resi gudang tersebut. Di Sumut bank yang menerima resi gudang adalah Bank Sumut dan Bank Rakyat Indonesia. ▲





AEKI Prediksi Ekspor Kopi Capai 350 Ribu Ton

Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI), memperkirakan produksi biji kopi tahun ini dapat naik 46.381 ton atau 8,4% menjadi 600.000 ton dibandingkan realisasi produksi tahun lalu yang mencapai 553.619 ton. Dengan capaian itu, AEKI memprediksikan ekspor kopi nasional tahun 2012 dapat tembus lebih dari 350.000 ton.

“Panen kopi di Lampung, Bengkulu, Palembang, sudah mulai sejak Mei lalu, dan sekarang sudah masuk masa akhir panen kopi,” kata Ketua Umum AEKI Suyanto Husein, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Suyanto, perkebunan kopi

di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga sudah mulai panen. Sedangkan beberapa propinsi lainnya di, Sulawesi Selatan, dan Flores baru memasuki musim panen. “Sepertinya, hasil panen kopi tahun ini cukup besar dibandingkan dengan tahun lalu,” ujarnya.

Seperti diketahui, produksi biji kopi pada 2011 sebanyak 553.619 ton turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya 684.076 ton. Penurunan produksi tersebut, menyebabkan volume ekspor turun 27,1% menjadi 352.007 ton dibandingkan dengan tahun sebelumnya 447.493 ton.

Adapun ekspor biji kopi pada tahun lalu terbesar ke Jepang 55.000 ton disusul AS 45.000 ton. Walaupun volume ekspor kopi tahun lalu turun 27,1%, tetapi nilainya naik 27,4% menjadi US\$1,06 miliar

dibandingkan dengan tahun sebelumnya US\$846.543.

Mengutip data Kementerian Pertanian, tercatat laju pertumbuhan perkebunan kopi dalam 3 tahun terakhir hanya 0,25%, sedangkan produksi kopi rerata naik 0,20%. Luas areal kopi pada 2011 diperkirakan 1,31 juta hektare, yang terdiri dari kopi arabika 296.854 ha dan robusta 1,01 juta ha. Untuk produksi kopi arabika pada tahun lalu mencapai 155.383 ton, sedangkan kopi robusta sekitar 400.000 ton. Sementara itu, luas perkebunan kopi milik rakyat sekitar 1,25 juta ha atau 96,15%, milik swasta 29.912 ha, dan perkebunan milik negara 23.167 ha. ▲

Cengkeh Diprediksi Tembus Rp 100.000 per kg

Harga cengkeh diperkirakan bakal naik pada akhir tahun nanti. Diperkirakan, harga cengkeh bisa menembus Rp 100.000 per kilogram (kg). Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) Dahlan Said memperkirakan, harga cengkeh akan naik pada akhir tahun karena stoknya tidak terlalu banyak di pasar.

“Saat ini kan sedang panen-panennya. Nanti 2-3 bulan lagi sekitar November hingga Desember, harga cengkeh bisa tembus Rp 100.000 per kg,” kata Dahlan.

Ketua APCI Sutarjo juga senada. Menurutnya, harga cengkeh bisa mencapai Rp 100.000 per kg pada Desember mendatang. Saat ini, harga cengkeh berada di kisaran Rp 85.000 hingga 90.000 per kg. Menurut Sutarjo, harga cengkeh masih stabil karena sedang masa panen.

Menurutnya, hasil panen tahun ini lebih bagus ketimbang 2010 dan 2011 lalu. Pada tahun 2010, produksi cengkeh sebesar 60.000 ton. Kemudian produksi cengkeh pada tahun 2011 melorot menjadi hanya sekitar 14.000 ton. Tahun ini, Sutarjo meramalkan produksi cengkeh

bisa mencapai 80.000 ton hingga 85.000 ton.

Tahun ini Kementerian Pertanian mematok target produksi cengkeh nasional sebesar 79.510 ton. Sementara itu, kebutuhan cengkeh nasional rata-rata sekitar 100.000 ton per tahun. Dari kebutuhan cengkeh tersebut dipenuhi dari pasokan cengkeh dalam negeri sebesar 90.000 ton baik dari hasil panen ataupun cadangan alias stok panen cengkeh dari tahun-tahun sebelumnya. ▲

Gerakan Tanam Kedelai di Kawasan Transmigrasi

Pemerintah berinisiatif untuk menambah jumlah lahan kedelai di Indonesia dengan memanfaatkan lahan kawasan transmigrasi. Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, penanaman kedelai tersebut dapat menambah volume produksi kedelai nasional untuk mendukung pemenuhan konsumsi nasional dan mengurangi impor kedelai.

“Melalui program gerakan tanam kedelai di kawasan transmigrasi, petani transmigran dapat menambah pendapatannya, sekaligus meningkatkan kesejahteraan di sekitar kawasan transmigrasi,” kata Muhaimin, di Jakarta, Septem

ber

Muhaimin menuturkan, pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 3.000 ha yang akan ditanami kedelai pada musim tanam bulan Oktober – Maret dan April – September. “sebenarnya potensi lahan untuk pengembangan kedelai di kawasan transmigrasi dapat mencapai luas sekitar 155.871 Ha. Namun yang benar-benar siap untuk masa tanam saat ini hanya 3.000 hektar,” terangnya.

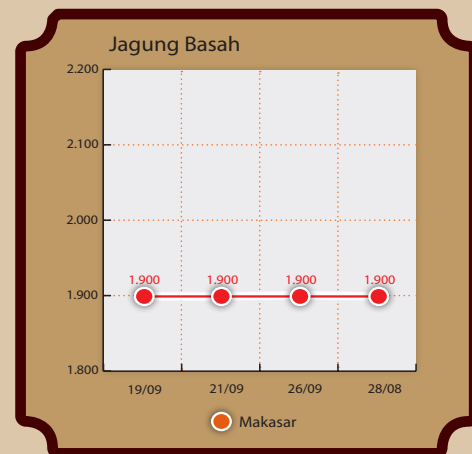
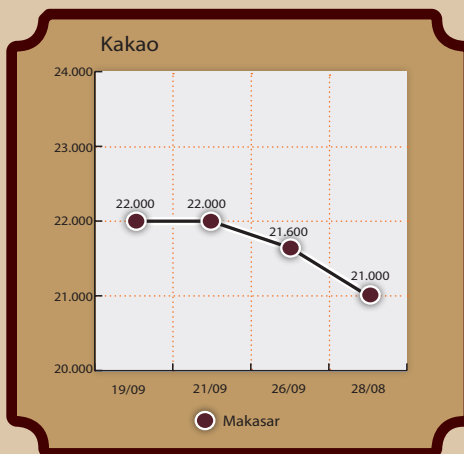
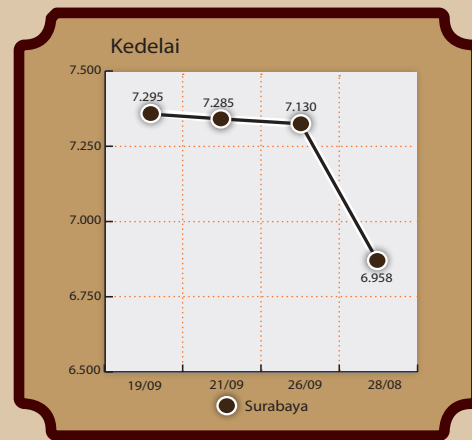
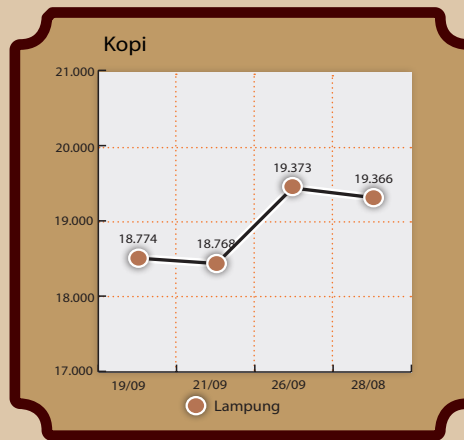
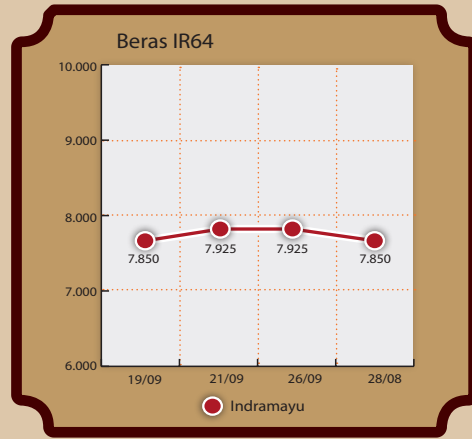
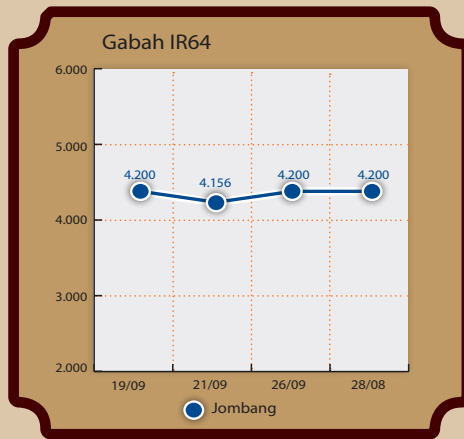
Luas lahan yang disiap ditanami kedelai, kata Muhaimin, tersebar di beberapa provinsi seperti Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan

Papua Barat. “Penanaman kedelai di lahan transmigrasi ini dipadukan dengan program transmigrasi lainnya,” jelasnya.

Muhaimin menambahkan, saat ini kebutuhan kedelai di dalam negeri dapat mencapai 2,2 juta ton per tahun, tapi selama satu tahun, produksi kedelai nasional hanya 700 juta ton. Salah satu penyebab rendahnya produksi kedelai nasional, kata Muhaimin, tidak terlepas dari minimnya lahan pertanian yang dimiliki. “Harusnya lahan yang dibutuhkan untuk tanaman kedelai minimal mencapai 500.000 hektare, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan nasional secara keseluruhan dibutuhkan lahan sekitar 1,5 juta hektare,” pungkas Muhaimin. ▲



Harga Komoditi (Rp/Kg)





Kanola Inovasi Minyak Nabati Layak Konsumsi

Minyak ini menjadi salah satu daftar minyak nabati populer yang digunakan masyarakat dunia. Namun, minyak kanola (canola oil) tergolong penemuan baru jika dibandingkan dengan minyak nabati lainnya.

Kanola merupakan tanaman subtropis yang merupakan keturunan tanaman *Rapeseed* atau kelompok tumbuhan marga *Brassica* (suku kubis-kubisan). Sebelum ditemukan tanaman kanola, masyarakat lebih dahulu mengenal tanaman jenis *Brassica* yang dimanfaatkan bijinya sebagai sumber minyak, yang dikenal dengan sebutan minyak rapa. Jadi dapat dikatakan, kanola yang diolah untuk menghasilkan minyak nabati, merupakan generasi baru dari minyak rapa (*Rapeseed*).

Brassica secara sistematis ditanam pada saat Abad Pertengahan di Eropa, Asia Barat, dan Asia Tengah untuk diambil minyaknya sebagai bahan bakar untuk lampu dan pelumas. Karena itu, minyak ini tidak baik dimakan karena mengandung asam erukat dan *glukosinolat* yang tinggi, sehingga dapat mengganggu fungsi otot jantung. Namun demikian, dalam kondisi sulit, minyak rapa dipakai juga untuk memasak sebagai pengganti minyak babi.

Selanjutnya, sekitar tahun 1960-an, ahli

botani Kanada menemukan tanaman varietas rapa terbaru melalui hasil perkawinan silang dari dua jenis tanaman *Brassica*. Kemudian, kultivar ini dikenal dengan kanola dan dari ekstrak bijinya menghasilkan minyak nabati berkadar asam erukat rendah. Biji kanola memiliki kandungan minyak sekitar 43%, dan ampas dari ekstrak biji kanola dapat dimanfaatkan sebagai makanan ternak yang berprotein tinggi.

Pada tahun 1970, kanola mulai dikembangkan di Universitas Manitoba, Kanada oleh Keith Downey dan Baldur Stefansson. Kemudian, kanola menjadi salah satu tanaman utama yang banyak dibudidayakan oleh Petani Kanada. Di tahun 1978, minyak kanola atau nama aslinya *canola*, akronim "Canadian oil, low acid", diperkenalkan secara luas di dunia. Nama ini dipakai untuk membedakan dengan minyak rapa (*Rapeseed*) yang telah lebih dahulu dikenal dengan kadar asam erukatnya yang lebih tinggi. Awalnya, nama "canola" menjadi merk dagang yang dipatenkan di Kanada, kemudian menjadi familiar di semua bela-

han dunia.

Berbeda dengan generasi tuanya, minyak kanola menjadi salah satu alternatif minyak goreng yang sehat, karena mengandung alfa-linolenat dan asam lemak omega-3. Minyak kanola menjadi sumber lemak tak jenuh tunggal, yang bisa digunakan sebagai pengganti mentega dan keju. Penggunaannya dapat mengurangi kadar kolesterol LDL yang buruk bagi kesehatan, sehingga menurunkan resiko terkena penyakit jantung.

Kelebihan lainnya, minyak ini memiliki tekstur ringan dan rasa netral yang membuat bahan lainnya tampak lebih menonjol, seperti dalam bumbu selada, saus untuk sayur-sayuran mentah dan bumbu perendam untuk daging atau ikan. Teksturnya yang lembut juga digunakan untuk makanan yang dipanggang seperti kue dan roti, dan titik didihnya yang tinggi membuatnya ideal untuk menggoreng dan menumis.

Tidak hanya sebagai minyak goreng, kanola juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kosmetika, tinta cetak, mi-



nyak pelindung panas matahari, minyak dan pelumas. Selain itu, minyak kanola juga digunakan untuk bahan bakar diesel atau biodiesel.

Adapun produsen utama kanola di dunia, yaitu Kanada dan Amerika Serikat. Sedangkan sebagian besar kultivar yang ditanam, merupakan hasil rekayasa genetik. Dari produksi kedua negara tersebut, dihasilkan sekitar 7 dan 10 juta ton dari biji kanola per tahun. Tercatat, Amerika Serikat merupakan negara dengan konsumsi minyak dan tepung kanola terbesar di du-

nia. Selain AS, minyak kanola juga banyak dikonsumsi di Kanada, Meksiko, Cina, dan Eropa. Sedangkan dari biji kanola, juga diekspor ke Jepang dan Pakistan.

Di Indonesia, kanola belum dibudidayakan dan diproduksi minyaknya. Namun untuk masyarakat yang ingin mengkonsumsinya, minyak kanola telah diimpor dari Kanada dan dapat diperoleh di pasar swalayan. Minyak ini dijual dalam kemasan 1 liter, 2 liter, 3 liter dan 5 liter dengan kisaran harga Rp 32 ribu sampai Rp 150 ribu. ▲



“Jampi-Jampi” Sehat Ala Kanola

Minyak kanola merupakan sumber minyak dan lemak yang membantu dalam penyerapan vitamin A, D, E dan K serta betakaroten. Dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, minyak kanola memiliki kandungan terendah di lemak jenuh (7%), lemak tak jenuh (93%), dan bebas dari lemak kolesterol. Selain itu, minyak ini kaya akan asam lemak omega-3 serta omega-6.

Minyak yang berasal dari ekstrak biji tanaman kanola ini, menjadi pilihan ideal untuk menggoreng karena memiliki titik asap 204° C. Hal tersebut, menyebabkan retensi minyak yang lebih rendah dalam makanan yang digoreng.

Minyak kanola berbeda dengan minyak rapeseed liar yang mengandung asam erusat (racun) yang tinggi. Varietas yang digunakan untuk memproduksi minyak kanola,

ternyata hanya mengandung kurang dari 2% asam erusat. Dengan kandungan ini, para ahli berpendapat tidak menyebabkan kerusakan pada manusia dan tidak berpengaruh buruk untuk kesehatan.

Hal ini diperkuat oleh keputusan Departemen Kesehatan Amerika Serikat, Administrasi Makanan dan Obat (FDA) pada tanggal 6 Oktober 2006. Dalam keputusannya, dijelaskan bahwa minyak kanola memenuhi syarat dan aman dikonsumsi, serta dapat mengurangi risiko penyakit jantung koroner karena kandungan lemak tak jenuhnya.

Selain itu, ilmuwan L. Rudel, Dr. Lawrence telah mengungkapkan fakta mengenai minyak kanola yang bisa mengurangi risiko *atherosclerosis* atau pengerasan pembuluh darah. Minyak ini juga merupakan sumber vitamin E, yaitu antioksidan dan sudah menunjukkan kemampuannya

dalam menurunkan risiko penyakit jantung koroner (PJK).

Menurut Lisa Donofrio, MD, dermatolog di Yale University School of Medicine, dengan mengonsumsi minyak kanola, akan memberikan nutrisi yang memberikan efek sehat pada kulit. Hal ini karena minyak canola menjadi salah satu sumber omega 3.

Sementara itu, Dr. Jody Levine, *Dermatologist*, asal New York City, AS, mengatakan, dengan mengonsumsi minyak kanola, maka dapat menyembuhkan jerawat, karena Omega 3 memiliki sifat anti-inflamasi yang membantu penyembuhan. Ahli kesehatan yang lain juga mengatakan, seorang vegetarian bisa mendapatkan versi ALA omega-3 dengan mengonsumsi minyak kanola. ▲

Khasiat Minyak Kanola

Rambut Kering dan Rontok

Gunakan minyak kanola ½ cangkir, panaskan sehingga menjadi hangat. Pijat dengan lembut ke kulit kepala. Tutup kepala dengan shower cap dan biarkan selama satu jam. Kemudian bilas rambut hingga bersih.

Kulit Kaki Mengelupas

Campurkan minyak kanola dengan pasir, lalu aduk hingga merata, kemudian oleskan pada kulit kaki. Kemudian gosok pergelangan kaki secara keras. Khasiatnya, mengangkat kulit mati sehingga dapat langsung terkelupas dan dapat mendorong pertumbuhan sel baru, serta dapat membersihkan serta melembapkan kulit kaki.

Menurunkan berat badan

Gunakan minyak kanola sebagai olesan pada baking pan dan hidangan, pangangan atau penggorengan. Cara ini lebih sehat daripada menggunakan mentega atau minyak goreng biasa.

Pereda Sakit Kepala

Konsumsi rutin minyak kanola, karena mengandung vitamin E dan tinggi antioksidan serta dapat meningkatkan sirkulasi, mengurangi peradangan dan menyeimbangkan kadar hormon.

Tabir surya

Campurkan minyak kanola, beewax, shea butter, minyak alpukat, minyak kelapa, dan minyak wijen. Secara terpisah hangatkan gel Aloe Vera dan campur dengan minyak cair dan mentega. Kemudian kocok kedua adonan yang terpisah tadi sampai tekstur menjadi lembut. Setelah adonan jadi, simpan dalam lemari es agar tidak terpapar panas terik matahari. ramuan ini selain dapat menangkal bahaya radikal bebas, juga melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari.





Alur Efektif Pengaduan Investor

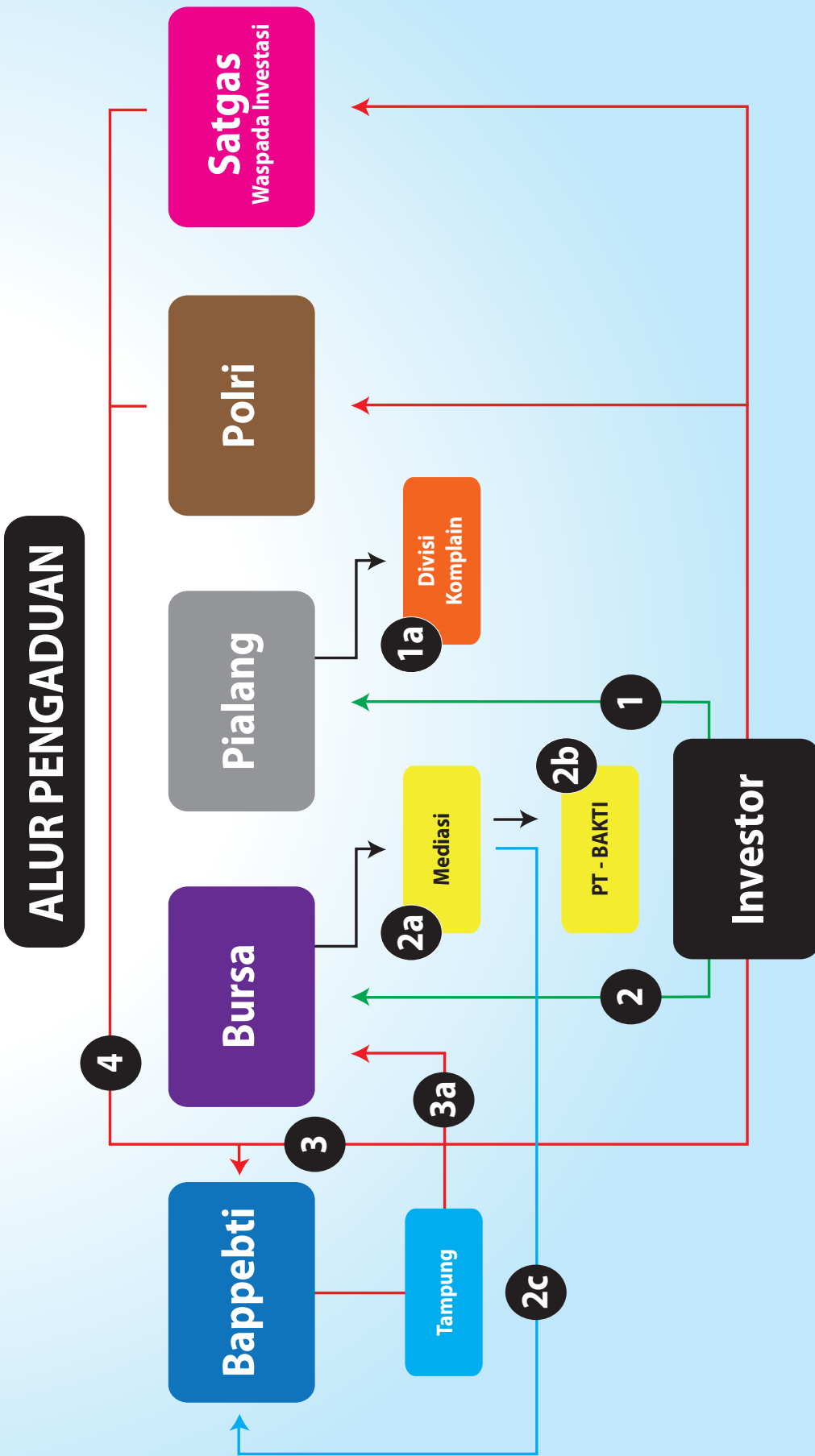
Pengantar Redaksi: Industri perdagangan berjangka komoditi bak dua sisi mata uang. Di satu sisi menjanjikan keuntungan bagi investor, tetapi di sisi lain juga memiliki risiko merugi baik akibat pergerakan harga maupun akibat praktik-praktik yang tidak sesuai peraturan dan perundang-undangan. Terkait risiko yang dialami investor akibat praktik-praktik ilegal dari perusahaan pialang berjangka, investor tetap memiliki hak guna menelusuri dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Otoritas perdagangan berjangka komoditi pun telah menetapkan sejumlah ketentuan yang dapat digunakan investor untuk menelusuri dan menyelesaikan permasalahannya.

Oleh karenanya dalam penyelesaian permasalahan, investor pun perlu membekali diri dengan pengetahuan dan wawasan memadai tentang perdagangan berjangka. Serta, mengantongi sejumlah bukti-bukti autentik seperti rekaman atau catatan transaksi. Jika hal itu dimiliki maka penyelesaian permasalahan

dapat dengan mudah diselesaikan.

Namun, untuk mencari titik temu yang saling menguntungkan baik di sisi investor maupun perusahaan pialang berjangka tetap tersedia saluran pengaduan yang efektif dan efisien. Hanya saja, realitanya pengaduan dan penyelesaian investor tak jarang menghadapi tembok kesulitan akibat kurangnya pengetahuan dan wawasan dari investor. Di sisi lain, pihak perusahaan pialang berjangka pun kerap kurang komunikatif akibat lemahnya fungsi koordinasi. Akibatnya, pengaduan investor banyak di-alamatkan ke Bappebti. Pada hal sejatinya investor dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan efisien dan efektif jika investor mengetahui alur penyelesaian permasalahannya.

Dalam kaitan itu, berikut ini disajikan sketsa penyelesaian permasalahan transaksi investor yang dilakukan di perusahaan pialang berjangka resmi berizin Bappebti;



1a Investor berkoordinasi dengan Divisi Komplain yang ada di perusahaan

2a Jika investor tidak menemui titik temu dengan Divisi Komplain perusahaan pialang berjangka, investor dapat mengadu ke Dewan Komite Bursa Berjangka. Pada tahap ini investor akan dimediasi dengan perusahaan pialang berjangka

2c Hasil mediasi Dewan Komite Bursa Berjangka dilaporkan ke Bappebti

3 Pengaduan nasabah yang dialamatkan ke Bappebti tetap akan diselesaikan di bursa lewat jalur mediasi yang dilakukan Dewan Komite Bursa Berjangka

2b Jika investor tetap tidak menemukan solusi maka permasalahan dapat diselesaikan lewat pengadilan dan atau Badan Arbitrasi Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)

4 Pengaduan yang dialamatkan ke Polri atau Satgas Waspada Investasi tetap disalurkan ke Bappebti dan selanjutnya dimediasi di Dewan Komite Bursa Berjangka



Indonesia Produsen Emisi Karbon Dunia

*) Barliana S. Siregar

Indonesia masuk dalam urutan kelima di dunia yang berpotensi melakukan suplai 10 % kredit karbon dunia. Dengan luas hutan lindung sekitar 36,5 juta hektar, diperkirakan nilai penyerapan karbon Indonesia berkisar US\$ 105 - US\$ 114 miliar per tahun.

Perdagangan emisi karbon merupakan kebutuhan yang penting bagi kelangsungan ekosistem global di masa mendatang. Hal pemicu perlunya perdagangan emisi karbon muncul setelah para ilmuwan mengemukakan perubahan iklim dunia yang meningkat mencapai 5 derajat celsius. Jika iklim dunia itu terus meningkat maka berpotensi membawa malapetaka kerusakan lingkungan.

Menurut para ilmuwan, emisi gas rumah kaca (green house gases- GHG) dianggap sebagai penyebab perubahan iklim global yang ditakutkan. Sektor energi khususnya kegiatan pembakaran bahan bakar fosil (batubara, minyak bumi, gas bumi), merupakan penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca (khususnya karbondioksida, CO₂). Oleh karena itu, sektor ini akan terkena dampak langsung kesepakatan dunia mengenai manajemen perubahan iklim tersebut.

Untuk mencapai target pengurangan emisi karbondioksida, maka pada Protokol Kyoto (1997) yang membahas kerangka kerja konvensi perubahan iklim (Framework Convention on Climate Change, FCCC) telah menyepakati bahwa negara-negara industri akan mengurangi tingkat emisi rata-rata 5,2 % dibawah level 1990 pada tahun 2008 hingga 2012.

Protokol Kyoto dilengkapi dengan mekanisme lentur (flexible mechanisms) yang menjadi bagian sangat penting dari Protokol tersebut. Termasuk dalam mekanisme lentur Protokol Kyoto tersebut adalah perdagangan emisi (emission trading- ET), penerapan bersama (joint implementation- JI) dan "mekanisme pembangunan bersih" (clean development mechanism- CDM).

Perdagangan karbon merupakan cara meringankan beban negara industri dalam mengurangi emisi gas mereka. Biasanya perdagangan itu dilakukan antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju akan membeli CER (certified emission reduction) dari negara berkembang. Karenanya, negara berkembang mendapat uang dari penjualan tersebut. Di sisi lain, hutan dari negara berkembang juga lebih terjaga karena perawatannya mendapat upah.

Perdagangan karbon atau yang lebih umum dikenal dengan emission trading, yang merupakan istilah dalam perdagangan sertifikat untuk mengurangi emisi karbon sesuai dengan target yang dicantumkan dalam sertifikat, dengan cara melakukan pendekatan untuk mengendalikan GHG dan emisi karbon.

Dalam perdagangan karbon setiap penurunan satu ton karbon akan mendapatkan sebuah sertifikat CER. Sertifikat tersebut menjadi alat jual beli pada perdagangan karbon. Harganya bervariasi tergantung pada pihak yang bertransaksi. CER dikeluarkan oleh Dewan CDM. Sertifikat CDM itu hanya mengeluarkan CER jika negara bersangkutan telah memenuhi kriteria additionality, real, measurable dan long-term benefit.

Bursa Karbon

Perdagangan emisi merupakan mekanisme untuk menjual dan membeli izin untuk melakukan pencemaran (emission permit) atau melakukan perdagangan karbon, yang dapat dilakukan misalnya di bursa karbon dunia yang diharapkan berkembang. JI mawadahi mekanisme untuk melakukan investasi proyek pengurangan emisi di suatu negara industri oleh suatu negara industri lainnya. Kredit

pengurangan emisi yang diperoleh dari pelaksanaan proyek tersebut akan diberikan kepada negara yang melakukan investasi. Selanjutnya, mekanisme yang melibatkan negara berkembang adalah yang dikenal sebagai CDM.

CDM merupakan mekanisme Protokol Kyoto yang memungkinkan negara industri dan negara berkembang bekerja sama untuk melakukan "pembangunan bersih". Dengan fasilitas CDM, negara industri dapat memenuhi kewajiban pengurangan emisinya dengan melakukan proyek "pengurangan emisi" di suatu negara berkembang dan si negara berkembang akan mendapatkan kompensasi finansial dan teknologi dari kerja-sama tersebut.

Tujuan CDM sebagaimana ditegaskan oleh Protokol Kyoto adalah membantu negara berkembang melakukan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan turut menyumbang bagi pencapaian tujuan pengurangan emisi global, serta untuk membantu negara industri mencapai target pengurangan emisi mereka. Investasi negara industri di negara berkembang yang menghasilkan penurunan emisi akan disertifikasi dan kredit dari "pengurangan emisi yang disertifikasi" (certified emission reduction, CER) tersebut akan diberikan kepada negara industri.

Kelebihan dari CDM yang tidak dimiliki oleh mekanisme lentur Protokol Kyoto lainnya adalah bahwa CER yang diperoleh sejak tahun 2000 hingga 2007 dapat digunakan sebagai kredit untuk memenuhi target pengurangan emisi dalam periode pertama penerapan Protokol Kyoto (2008-2012).

Dengan demikian CER merupakan komoditas baru dalam perdagangan berjangka yang prospektif. CER merupakan komoditas yang menguntungkan



kan sama halnya dengan sekuritas yang banyak diperdagangkan. Bahkan bukan suatu hal yang mustahil bila pada masa datang, perdagangan karbon menjadi komoditas yang laku seperti halnya perdagangan minyak dan emas seperti sekarang ini.

Saat ini, negara-negara yang sudah melakukan perdagangan karbon dalam bursa diantaranya seperti negara-negara Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Jepang. Dengan bursanya antara lain, European Climate Bursa, NASDAQ OMX Komoditas Eropa, PowerNext, Commodity Exchange Bratislava, Bursa Energi Eropa, Carbon Trade Exchange, Chicago Climate Bursa.



Sistem Perdagangan

Manfaat ekonomi yang bisa diperoleh dari emisi gas karbon tersebut adalah penanaman pohon untuk menyimpan emisi gas karbon, yang kemudian diperdagangkan. Sekedar ilustrasi, Australia yang dikenal sebagai negara industri akan membayar negara-negara berkembang seperti India dan Indonesia untuk menyimpan carbon yang diperoleh melalui proyek CDM atau dibeli melalui pasar Emission Trading Scheme (ETS).

Lebih lanjut mengenai perdagangan emisi karbon, secara umum terdapat dua sistem utama dalam perdagangan tersebut, yaitu cap and trade dan baseline and credit. Kadang-kadang kedua jenis skema tersebut dapat diterapkan secara bersama-sama dalam sistem perdagangan emisi. Misalnya, Protokol Kyoto memasukan baik skema cap

and trade untuk negara-negara maju maupun skema baseline and credit untuk proyek-proyek pengurangan emisi di negara-negara berkembang. Hal ini disebut Mekanisme Pengembangan Bersih (CDM). Perdagangan emisi dapat bersifat wajib (diharuskan oleh pemerintah) atau sukarela.

Dalam sistem cap and trade, sebuah otoritas pusat (biasanya sebuah badan pemerintah) menentukan batas atau cap jumlah karbon yang dapat dikeluarkan. Negara-negara atau perusahaan-perusahaan kemudian diperbolehkan untuk mengeluarkan gas-gas rumah kaca (misalnya, karbon dioksida) sampai dengan jumlah yang dibatasi. Apabila emisi karbon lebih tinggi dari pada batas tersebut, maka negara atau perusahaan tersebut perlu membeli kredit karbon untuk diperhitungkan dengan emisi mereka.

Apabila jumlah emisi lebih rendah dari batas yang ditentukan, maka negara atau perusahaan tersebut diperbolehkan menjual selisih antara emisi aktual dan batas yang diizinkan bagi mereka dalam bentuk 'kredit karbon' (dengan demikian mereka memperoleh insentif finansial atas pengurangan emisi mereka).

Berdasarkan sistem baseline and credit, sebuah kelompok atau perusahaan yang tidak menganut sistem cap and trade (seperti Indonesia) dapat menciptakan kredit dengan mengurangi emisi mereka di bawah tingkat skenario baseline (usaha seperti biasa). Salah satu contoh adalah sebuah perusahaan yang menukar bahan bakar fosil dengan energi terbarukan seperti biofuel dari minyak Jarak. Baseline untuk perusahaan tersebut adalah emisi dari diesel yang mempunyai keluaran (output) gas-gas rumah kaca yang tinggi. Pada saat diganti dengan biofuel, jumlah emisi jauh lebih rendah dan selisih yang tercatat antara jumlah emisi karbon dapat dinyatakan sebagai kredit karbon yang kemudian dapat dijual di pasar internasional. Hal ini memberikan insentif bagi pengembangan sumber daya energi terbarukan dan pengurangan emisi.

Sistem perdagangan emisi baseline and credit merupakan suatu sistem di mana perusahaan dihargai untuk mengurangi polusi karbon di bawah "baseline". Pengurangan ini menjadi "credit" yang dapat diperdagangkan. Pihak ber-

tanggung jawab dalam skema tersebut harus membeli kredit ini, dan kemudian menyerahkan mereka ke regulator pada akhir setiap tahun untuk memenuhi bagian mereka dari ekonomi-lebar atau sektor-lebar target. Setiap 'kredit' merupakan satu ton karbon dioksida ekuivalen mereda. Baseline umumnya intensitas berbasis, yaitu polusi karbon per unit produksi.

Sebuah harga karbon akan ditetapkan oleh perdagangan kredit. Harga kredit akan variabel, tergantung pada keseimbangan antara pasokan kredit dari mereka yang melaksanakan proyek pembawa polusi karbon di bawah baseline dan permintaan kredit dari orang-orang yang harus memenuhi target. Perusahaan yang berpartisipasi dalam mekanisme baseline and credit, menghasilkan pendapatan dengan menghasilkan kredit dan menjualnya.

Indonesia yang merupakan negara di mana sektor energi memberikan sumbangan besar tak hanya untuk menggerakkan ekonomi nasional, tapi juga dalam menyumbangkan pendapatan langsung dari penjualan produk-produk energi, khususnya bahan bakar fosil. Ekspor minyak bumi, gas bumi dan batubara merupakan sumber utama pendapatan pemerintah sejak lebih 3 dekade yang lalu. Indonesia juga adalah negara agraris, mempunyai hutan-hutan tropis serta garis pantai yang terpanjang di dunia, sehingga perubahan iklim yang akan berpengaruh terhadap pemanasan global merupakan masalah yang menjadi perhatian Indonesia.

Peluang perdagangan karbon di Indonesia sangatlah besar dengan perhitungan potensi karbon yang terserap di hutan Indonesia capai 25,773 miliar ton. Potensi itu belum termasuk karbon yang terdapat di lahan hutan gambut dan lahan kering. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mencatat Indonesia diperkirakan mampu menyerap 5,5 giga ton CO₂.

Karena itu, Indonesia menduduki urutan kelima di dunia yang berpotensi melakukan suplai 10% kredit karbon dunia. Dengan luas hutan lindung sekitar 36,5 juta hektar, nilai penyerapan karbon Indonesia berkisar US\$105 miliar hingga US\$114 miliar. *) Pemerhati perdagangan berjangka komoditi (dari berbagai sumber). ▲



Keep alert on illegal foreign broker

Illegal futures broker who offers forex products trading or other fake investment can be charged for 10 years in jail or fined for 20 billion. This has been arranged under Legislation No.10 year 2011, on commodity futures trading.

The chief of coftra law bureau, Alfons Samosir said that foreign broker operation who grabbed domestic investor is illegal as they do not have trading licence in Indonesia and are not registered as a member of exchange or coordination bureau of capital investment.

Moreover Alfons said that the elimination and handling of local illegal broker company is easier to be processed by law as all management and owner are in Indonesia.

"Therefore, the community is appealed to give full information on related management and company to help our law enforcement."

"Some illegal agents or company who offered foreign exchange trading have been carried out by the police. But the overseas illegal company is little bit difficult as they offered the products by online," Alfons explained.

In practice, the operation of foreign illegal company was structured and the location was difficult to be traced, he added. There was a foreign company that mentioned an address outside the capital city but when we traced it the address was fake.

"So usually they don't have representative office in Indonesia and they controlled the company directly from head office in overseas. And all are done by online" he said.

According to Alfons, some foreign brokers have representative office in Indonesia and It's only used as training office. Otherwise the office is covered as training centre and investment education. "Therefore they do not have official office as broker company,"

"To convince the investor candidate in society, some of those foreign companies are using licence from education department as special institute on their activities," he explained.

Moreover, Alfons said the branch offices of illegal foreign broker are not managerial connected each other. Each office will directly report to head office in overseas such as USA, Australia, UK, Hong Kong, and Russian.

"Therefore we emphasize to society to be more careful in choosing investment company"

Don't be tempted with fixed income or investment in small contract. The more important is to pay attention on the company legality. If they are not registered in Coftra or BPKM means illegal," Alfons Samosir emphasized. ▲

JFX is ready to launch coal contract

Jakarta Futures Exchange (JFX) is expected to trade on coal commodity futures exchange in near future. It's intended to create a transparent coal commodity market through domestic futures exchange mechanism. Moreover it is also to support JFX performance towards multilateral futures contract trading.

"Therefore we JFX explained the advantage of commodity futures trading mechanism to directorate general of Minerba, ESDM ministry, directorate of coal entrepreneur establishment" director of JFX, Bihar Sakti Wibowo explained.

Basically the activity is emphasizing on futures trading socialization, Bihar added, and in the same time also delivering JFX plan to trade coal futures contract. It's

expected that in the short time JFX will trade coal futures contract, he added. As we have done some coal market examinations since couple years ago. "Basically we are ready to launch it but we also need assurance from market agent and supporting policy from ESDM ministry."

"The coal contract trading in JFX the futures exchange is very strategic because of Indonesian position as one of the biggest exporter producer. Therefore coal future contract is very eligible for trading through futures exchange" he said.

"Base on the plan, we coordinate with directorate general of Minerba and also some industries as coal commodity user such us BUMN companies. We also do same activity towards local coal producer," Bihar said. ▲

Single association of PBK industry will be established in near future

After the establishment of Legislation No. 10 year 2011 on commodity futures trading that was committed on the establishment of the association of Indonesian commodity futures trading industry, the market agent has done some serial activities to prepare the establishment of the single association of Indonesian futures trading industry.

On the other hand the caretaker team for AIPB establishment has been established.

The chief of Indonesian futures broker company association (AIPB), I Gde Rakatantra said that in the future all Indonesian futures trading industry agent will only be accommodated by one association which is Indonesian commodity futures trading industry association (AIPB).

"This is the amendment of law.

Therefore 2 existence association will be blended into one. APBI and Indonesian Futures Trader company union (IP2BI) later will be the pioneer of AIPB establishment," Rakatantra said.

Furthermore it is said that caretaker team of AIPB establishment has been established. "The market agent in acclamation has appointed Alexander Gee as their chief," he said.

"We are really hoping that the team can work maximize therefore AIPB can be established soon and comforts the market agent," Rakatantra explained.

According to I Gde Rakatantra, if AIPB has been established, it has some big agendas towards the developments of Indonesian futures trading industry. One of the agenda is to improve image and healthy competition of futures trading agent. ▲



Erwin Malonda

Cengkram Kuku Bimasakti Diindustri Futures Trading



Branding and Trust. Itulah dua kata yang terucap memulai pembicaraan dengan Direktur Utama PT Bimasakti Berjangka, Erwin Malonda. Lebih jauh diurai Erwin, begitu dia disapa, dengan dua kata tersebut diharapkan PT Bimasakti Berjangka (BSB) tumbuh dan berkembang menjadi salah satu pelaku pasar keuangan global.

“Kami memiliki visi dan misi membawa Bimasakti dalam jangka panjang yakni sebagai lembaga keuangan non bank berkelas dunia. Karena itu, motto perusahaan ini Global Leader in Financial Market,” jelas Erwin di ruang kerjanya di Menara Palma Lt. 15, Jl. HR. Rasuna Said, Kav. 6, Jakarta Selatan.

Sebab itu, sasaran utama kami mengoperasionalkan perusahaan ini, sejak dini menciptakan brand Bimasakti yang

dikenal luas masyarakat, tutur pria berkacamata ini. “Kalau masyarakat sudah kenal maka mereka akan mencari informasi yang lebih banyak tentang Bimasakti.”

“Dan disaat yang bersamaan, kami memberi kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat atau investor yang mengelola investasinya melalui Bimasakti,” katanya.

Dengan adanya rasa nyaman dan aman dipihak masyarakat atau investor, tambah Erwin, tentunya mereka akan memiliki trust- kepercayaan kepada Bimasakti.

“Itulah bagian dari tugas dan tanggungjawab saya memimpin perusahaan ini,” tegas suami dari Vivi Santoso, ini.

Lebih jauh dipaparkan peraih gelar Sarjana Hukum dan Sarjana Ekonomi dari Univ. Arilangga, 1998, Surabaya, ini, digunakannya brand Bimasakti pada perusahaan pialang anggota Jakarta Futures Exchange, itu, yakni untuk memberi semangat dan motivasi yang kuat dari tokoh pewayangan Bima Sakti.

“Harapan kami, dengan menggunakan brand Bimasakti filosofi tokoh Bima Sakti dalam legenda perwayangan Indonesia tercermin di perusahaan ini. Di samping itu, hampir tidak ada perusahaan pialang berjangka menggunakan tokoh-tokoh legenda Indonesia. Kebanyakan perusahaan pialang menggunakan brand yang mencerminkan keuntungan. Pada hal, dalam setiap bisnis apa pun pasti ada risiko merugi,” jabar Erwin.

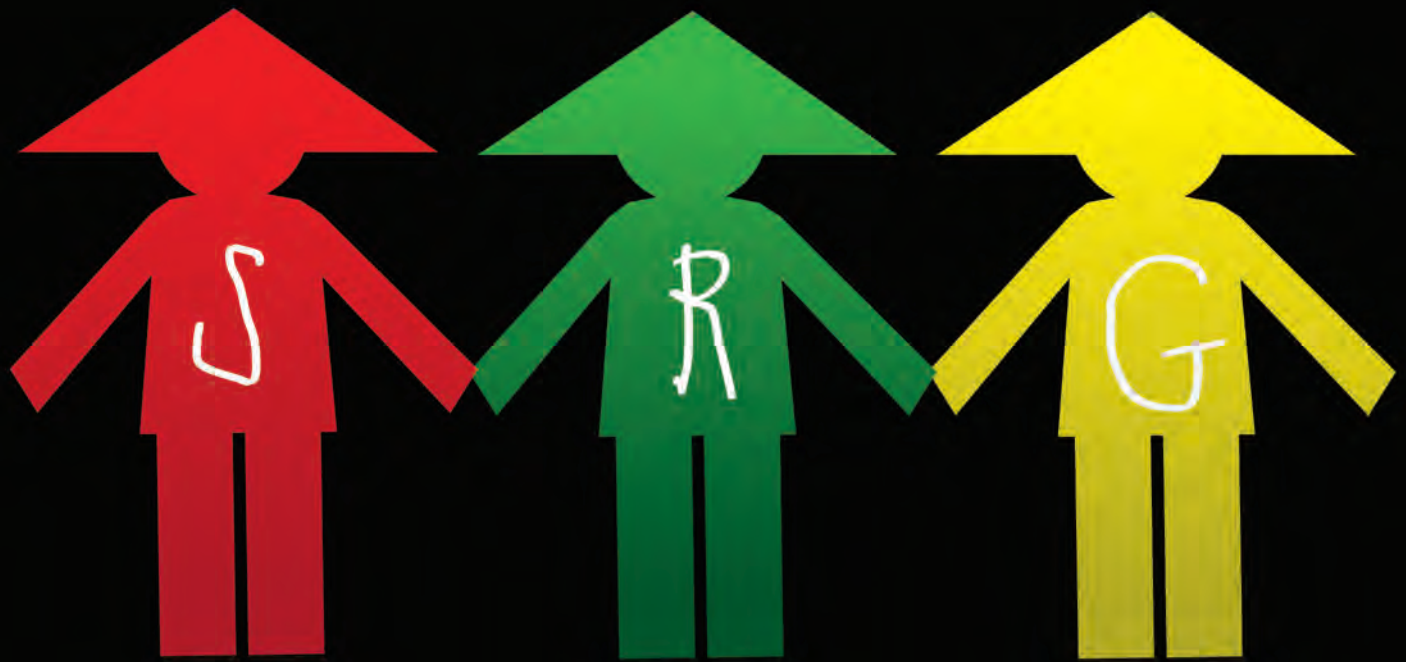
Menurut Erwin, ayah dari David Bryant (9) dan Chelsea Florencia (7), dia diberi kepercayaan penuh oleh dua rekannya selaku pemegang saham untuk mengelola Bimasakti. “Pemegang saham perusahaan ini ada sebanyak tiga orang,

saya dan dua rekan yang lain. Kami bertiga sepakat, saya yang mengelola Bimasakti. Meski pada dasarnya pemilik perusahaan bisa saja menugaskan kepada profesional lain.”

Ada sisi positifnya pemegang saham merangkap direksi, yakni bisa mengontrol laju perusahaan. Jika ada masalah, bisa langsung ditangani. Tetapi di sisi lain, saya pun harus mengurangi waktu untuk kegiatan lain. “Basic saya juga pengusaha, di bidang konstruksi, perbengkelan dan spare part otomotif dan juga ada perusahaan jasa. Semua usaha itu ada di Surabaya. Dengan memimpin perusahaan ini, semua usaha yang saya rintis itu sehari-harinya diserahkan kepada istri untuk mengelolanya.”

BSB saat ini telah memiliki dua cabang utama yakni di Surabaya dan Denpasar, Bali. Dipilihnya dua kota besar tersebut ditujukan sebagai representasi pembagian wilayah pemasaran. Kantor pusat Jakarta akan melayani masyarakat yang berada di wilayah Barat Indonesia. Sedangkan kantor cabang Surabaya, melayani masyarakat yang berada di wilayah tengah dan kantor cabang Denpasar melayani Wilayah Timur Indonesia.

“Dalam jangka panjang tentunya kami akan membuka kantor cabang di berbagai kota besar lainnya. Saat ini pun sudah ada permintaan dari sebagai investor yang menghendaki Bimasakti membuka cabang di Palembang, Semarang dan Kalimantan. Tetapi permintaan itu masih dipelajari dan dikaji. Jika mendesak membuka kantor cabang untuk meningkatkan pelayanan kepada investor, kami pun akan segera bekerja dan membuka kantor cabang baru,” beber Erwin. ▲



Sistem Resi Gudang

STABILITAS HARGA
&
PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi - BAPPEBTI
www.bappebti.go.id